

Gagasan Kebijakan Publik Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014

*Suatu Analisis Framing terhadap Perspektif Kebijakan Publik di Forum Debat Kandidat Capres dan Cawapres
Prabowo Subianto – Hatta Radjasa dan Joko Widodo – Jusuf Kalla*

Deni Darmawan¹

Abstrak

Gagasan kebijakan publik dalam Pilpres RI 2014 tercermin utuh, dalam forum debat tematik yang mengangkat berbagai isu strategis khususnya tentang pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih, dan kepastian hukum menjadi daya tarik tersendiri bagi publik guna mengenal lebih dekat pemikiran, kapabilitas dan kepribadian Capres-Cawapres yang akan dipilih. Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif karena hendak menghasilkan suatu gambaran dan model dari subyek yang diteliti yakni bagaimana model kebijakan publik yang ditawarkan masing-masing pasangan Capres-Cawapres. Teknik yang digunakan adalah observasi dan data sekunder dengan metode analisis *framing* yang menekankan pada pemaknaan teks dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model gagasan kebijakan yang diperdebatkan adalah sesuai dengan proses kebijakan model Anderson, dkk dimana substansi debat disetiap segmen mencerminkan adanya proses agenda, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Berdasarkan formula itu maka peneliti menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang mendasar dari gagasan kebijakan tentang pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum karena pemikiran kedua pihak sejalan untuk mewujudkan demokrasi yang murah, sederhana, bermutu, produktif, nondiskriminatif, mensejahterakan dan menggembirakan rakyat; pemerintahan bersih dalam sistem birokrasi yang transparan, akuntabel dan efektif melayani; serta komitmen mewujudkan kepastian hukum tanpa pandang bulu demi terpenuhnya rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Kata kunci: gagasan kebijakan-debat pilpres-tahapan kebijakan

Pendahuluan

Gagasan kebijakan publik dalam format debat Capres dan Cawapres RI 2014 adalah sekumpulan ide pemikiran atau konsep program yang diusung, dibahas, diperdebatkan dan ditawarkan dalam kontestasi Pilpres dihadapan publik dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang diyakini mampu mengatasi permasalahan atau berdampak solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.

Pasca Pemilu Legislatif 9 April 2014, Warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, harus bersiap menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014. Pileg yang tidak menghasilkan partai pemenang diatas perolehan kursi 20%

atau memperoleh 25% suara sah nasional itu telah “memaksa” partai peserta Pileg untuk membangun kerjasama atau koalisi dalam rangka mengusung kandidat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah melalui serangkaian proses dan manuver politik, walhasil kristalisasi kekuatan partai-partai politik akhirnya mengusung pasangan nomor urut (1): Prabowo Subianto (Capres) dan Hatta Radjasa (Cawapres) dan pasangan nomor urut (2): Joko Widodo (Capres) dan Jusuf Kalla (Cawapres). Sejak ditetapkannya kedua pasangan calon oleh

¹ Staf pengajar FISIP Universitas Tanjungpura

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, maka serangkaian tahapan dan agenda Pilpres pun dilaksanakan sebagaimana Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Tahapan kampanye yang dimulai sejak 4 Juni s/d 5 Juli 2014, membuat masing-masing kubu melakukan berbagai cara guna meningkatkan elektabilitas sang capres ditengah jadwal kampanye yang begitu ketat sebelum masuk masa tenang 6 s/d 8 Juli 2014. Dalam masa kampanye tersebut terdapat 5 putaran agenda debat capres cawapres sebagaimana ditentukan KPU sejak 9 Juni sampai 5 Juli 2014 (republika.co.id). Debat tematik yang mengangkat berbagai isu strategis seperti demokrasi, pemerintahan bersih, kepastian hukum, pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dsb menjadi daya tarik tersendiri bagi publik guna mengenal lebih dekat pemikiran, kapabilitas dan kepribadian capres-cawapres yang nantinya mereka pilih. Berangkat dari debat ini pula, suhu politik kian hangat ditengah hiruk pikuk media massa yang juga turut terbelah keberpihakannya terhadap masing-masing kubu yang ada. Jauh sebelumnya kampanye hitam dan kampanye negatif juga menyeruak ditengah masyarakat terkait dengan masing-masing pasangan capres-cawapres.

Kehadiran debat kandidat sebagai bagian dari mekanisme pemilu yang diselenggarakan KPU dan dapat disaksikan secara utuh oleh pemirsa, memberikan corak yang lebih objektif bagi publik dalam menilai siapa yang layak dipercaya, terlepas dari propaganda kampanye hitam dan negatif terhadap kedua kubu. Kendati demikian, berbagai hal terkait dengan debat juga terus dieksploitasi dari berbagai perspektif oleh kedua kubu yang kemudian direproduksi dalam bentuk informasi baru yang dianggap efektif mempengaruhi persepsi publik.

Nuansa debat terasa lebih “meriah” bukan hanya karena penampilan capres-cawapres beserta pendukungnya, namun karena begitu banyaknya keragaman perspektif yang terlibat

dari debat tersebut. Ada yang menilai dari substansi tema yang diperdebatkan hingga hal-hal kecil yang luput dari perhatian publik pun turut diangkat dan dipersoalkan. Intinya, wacana debat capres-cawapres 2014 melibatkan banyak pihak diantaranya pengamat, pakar, purnawirawan TNI, politisi, kritikus hingga masyarakat awam dalam menanggapi isu ekonomi, demokrasi, pemerintahan, hukum, kesejahteraan sosial, politik internasional, ketahanan nasional, dsb. Dari opini yang berkembang, terkesan bahwa perdebatan di luar forum debat capres-cawapres cenderung lebih liar dan tendensius keberpihakan terhadap masing-masing calon. Sehingga, sekalipun komentar datang dari pengamat yang independen, tetap saja mengandung muatan menggiring opini publik kepada calon yang dikehendaki.

Fakta ini dapat dimaklumi sebagai bagian dari strategi kampanye masing-masing kubu, namun mekanisme debat bukanlah sekedar ajang referensi bagi calon pemilih untuk menentukan pilihan capres-cawapres saja, tetapi lebih dari itu debat difungsikan sebagai jaring gagasan kebijakan publik yang dapat ditelaah secara kritis sebagai jaminan garansi atas janji-janji kampanye capres-cawapres terpilih.

Gagasan dibalik suatu kebijakan menarik untuk diketahui guna mengkonfirmasi apakah substansi kebijakan tersebut mengandung tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Spektrum kepentingan yang luas dari suatu kebijakan publik menuntut pendekatan multidisipliner dengan melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/*public policy* sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*)”.

Berdasarkan pengertian ini, maka gagasan

kebijakan publik dalam konteks debat Capres dan Cawapres RI 2014 adalah sekumpulan ide pemikiran atau konsep program yang diusung, dibahas, diperdebatkan dan ditawarkan dihadapan publik dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang diyakinkan mampu mengatasi permasalahan atau berdampak solusi dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Senada dengan definisi ini, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Secara harfiah, Capres dan Cawapres bukanlah pemerintah definitif namun masih dalam proses menuju kearah posisi puncak Kepresidenan sebagai Kepala Pemerintahan yang mana hasil dari kontestasi Pilpres tersebut akan menghasilkan satu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Mereka-lah yang kemudian berwenang membuat dan melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka Gagasan kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut :

- 1) Gagasan kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya yang diyakini berdaya solusi atas berbagai persoalan bangsa;
- 2) Gagasan kebijakan publik tersebut diwacanakan masing-masing pasangan Capres dan Cawapres dihadapan publik dalam suatu mekanisme debat yang pelaksanaannya diatur oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu;
- 3) Gagasan kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh masing-masing pasangan Capres dan Cawapres apabila mereka terpilih sebagai Kepala Pemerintahan Republik Indonesia 2014.

Dari poin-poin di atas maka kita bisa menarik benang merah dari definisi kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman

Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan publik adalah “keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak”.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan publik mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik. Menurut Subarsono (2005:3) kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan

Keputusan Walikota/Bupati. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pernyataan pejabat publik juga merupakan bagian kebijakan publik. Hal ini dapat dipahami karena pejabat publik adalah salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalam implementasi kebijakan itu sendiri.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000: 110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan yaitu: kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan

Pemikiran ini pula yang melatari pentingnya upaya penelitian dengan metode pengungkapan dan penafsiran yang lebih mendalam atas pergulatan gagasan yang mengemuka didalam forum debat capres-cawapres terkait dengan tema-tema yang relevan dibahas oleh masing-masing kubu. Sehingga peneliti berinisiatif memaknai momentum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2014 ini dalam sebuah karya ilmiah berjudul: **“Gagasan Kebijakan Publik Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014”** -- *Suatu Analisis Framing terhadap Perspektif Kebijakan Publik di Forum Debat Kandidat Capres dan Cawapres Prabowo Subianto – Hatta Radjasa dan Joko Widodo – Jusuf Kalla.*

Gagasan tematik terkait orientasi kebijakan publik yang tercermin dari substansi visi dan misi pasangan Capres 1 & Capres 2 yang mengemuka dalam mekanisme debat kandidat oleh KPU Pusat terkait agenda Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum.

- 1) Apa sajakah pemikiran dan dialektika yang berkembang terkait dengan agenda Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum sebagai tema yang dibahas dalam debat capres-cawapres 2014 ?
- 2) Kemana arah kebijakan publik Capres 1 dan Capres 2 jika terpilih sebagai Presiden RI 2014?
- 3) Apakah perbedaan mendasar dari konsep kebijakan publik dalam kontestasi Pemilu Presiden RI 2014?

Metode

Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif karena hendak menghasilkan suatu gambaran dan model dari subyek yang diteliti yakni bagaimana model kebijakan publik yang ditawarkan pasangan Capres melalui dialektika gagasan dalam Debat Kandidat Pemilu Presiden 2014 yang diselenggarakan KPU Pusat. Teknik Pengumpulan Data *Observasi*, dengan teknik pengumpulan data ini peneliti dapat merekam berbagai fenomena yang terjadi baik di lokasi penelitian maupun situasi diluar

lokasi yang relevan dengan subjek penelitian termasuk prosedur menghimpun, memilah, mengidentifikasi dan menafsirkan data yang beredar di media massa atau media *online* baik lokal dan nasional terkait *angle*, topik dan *content* berita (news) atau opini dan wacana (artikel) seputar gagasan dan konsep kebijakan Pilpres Republik Indonesia .

Subjek adalah Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 (Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa) dan Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 (Joko Widodo dan Jusuf Kalla). Obyek penelitian adalah publikasi gagasan atau agenda kebijakan masing- masing subyek.

Hasil dan Pembahasan

Gagasan dan Proses Kebijakan Publik

Gagasan kebijakan publik dalam format debat Capres dan Cawapres RI 2014 adalah sekumpulan ide pemikiran atau konsep program yang diusung, dibahas, diperdebatkan dan ditawarkan dalam kontestasi Pilpres dihadapan publik dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang diyakini mampu mengatasi permasalahan atau berdampak solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.

Dalam kaitan proses kebijakan, gagasan berfungsi mengisi dan mengarahkan setiap tahapan kebijakan. Sedangkan agenda kebijakan adalah langkah awal dari proses kebijakan publik menurut Anderson, dkk.

Tahap 3: Adopsi Kebijakan yakni suatu pengembangan dukungan terhadap usulan kebijakan yang telah diformulasikan sehingga dapat diakui menjadi kebijakan resmi. Dalam konteks ini baik pasangan 1 dan 2 menyadari bahwa pemenang diantara mereka berpeluang mengadopsi visi dan misinya dilegitimasi dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahun kedepan. Oleh karena itu, momentum kampanye Pilpres merupakan kesempatan untuk meyakinkan dan meraih simpati pemilih sehingga memberikan legitimasi sosial terhadap gagasan dalam adopsi kebijakan mereka, sebelum melangkah pada legitimasi hukum dan politik nantinya.

Tahap 4: Implementasi Kebijakan yakni penerapan kebijakan oleh pemerintah dengan menggerakkan sistem administrasi. Dalam

konteks ini, implementasi kebijakan adalah konsekuensi dari kemenangan dalam kontestasi Pilpres sehingga siapapun pemenangnya harus dapat menerapkan kebijakan sebagai aktualisasi dari janji-janji politik saat kampanye. Namun, implementasi kebijakan dalam format debat Capres Cawapres juga tercermin dari segmen pertanyaan kepada pasangan 1 dan 2 terkait langkah-langkah nyata mereka atas tema debat.

Tahap 5: Evaluasi Kebijakan yakni upaya pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan terlaksana efektif dan mengapa tidak. Dalam kaitan ini pemenang Pilpres harus siap mendapat sorotan publik dan berbagai elemen ekosistem negara dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, karenanya sistem evaluasi kebijakan di lingkungan pemerintah harus dapat bekerja guna memastikan berbagai pelaksanaan program kebijakan berjalan efektif. Namun, evaluasi kebijakan juga dimaknai oleh pasangan 1 dan 2 dengan cara mengkritisi kebijakan pemerintah sebelumnya yang terungkap dalam perdebatan Pilpres maupun selama kampanye berlangsung.

Agenda Kebijakan

Fokus penelitian pada *framing* dibalik pemberitaan media tentang debat Pilpres pasangan 1 dan 2 bertema “Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum” yang dilaksanakan pada 9 Juni 2014 lewat tayangan langsung yang disiarkan TV One. Debat yang diselenggarakan KPU ini dimoderasi pakar Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Dr. Zainal Arifin Mochtar dari UGM Yogyakarta. Dalam penjelasan awalnya, moderator memberitahukan bahwa format debat terdiri atas 6 segmen dimana masing-masing segmen memiliki substansi pertanyaan dan model debat yang berbeda terkait tema yang sama. Dari variasi segmen debat tersebut kemudian diproyeksikan pada model proses kebijakan yang diadaptasi dari Anderson, dkk, yakni peneliti mencoba meletakkan pertanyaan dan jawaban dalam tafsir tahapan kebijakan publik yang telah dipaparkan sebelumnya.

Berangkat dari pertanyaan moderator kepada pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (selanjutnya disingkat PH) dan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla (selanjutnya disingkat JJK) dalam segmen 1 yang eksplisit mengarah kepada pertanyaan agenda kebijakan yang berbunyi: “Apa pandangan anda tentang agenda yang anda anggap paling penting, utama dan unggulan untuk dilaksanakan dalam kaitan tema hari ini?”.

Jawaban rinci atas pertanyaan tersebut dikemukakan masing-masing Capres dan Cawapres dengan cara saling mengisi guna memanfaatkan alokasi waktu yang diberikan dengan durasi sekitar 6 menit kepada masing-masing pasangan 1 dan 2. Deskripsi tekstural terhadap pernyataan, jawaban atau argumen kemudian disusun berdasarkan kesamaan isu dan substansi, berikut petikannya:

Demokrasi (PH)

“Demokrasi kita harus diperbaiki, dipelihara dan dikembangkan terus; Demokrasi yang telah dicapai sekarang dengan susah payah, penuh pengorbanan, sehingga kita merasakan demokrasi Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ke-3 didunia; Demokrasi kita masih banyak kekurangan; Demokrasi memerlukan budaya demokrasi; Kita butuh pendidikan politik; rakyat sebagian besar baru merasakan punya hak politik untuk ikut pemilu, tetapi kadang-kadang belum merasakan betapa pentingnya hak politik tersebut dilaksanakan dengan penuh pencerahan dan tanggung jawab”.

Dari pernyataan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa agenda kebijakan atas pembangunan demokrasi memerlukan budaya demokrasi dan pendidikan politik sehingga hak politik rakyat terlaksana dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Demokrasi (JJK)

“Republik ini adalah milik kita semua, harapan rakyat ingin hidup lebih baik ingin lebih sejahtera; Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya, karena itu kami mendatangi mereka dimanapun demi mendengar suara rakyat; dengan cara dialog untuk musyawarah untuk kemandirian bagi rakyat banyak; bermusyawarah, mengundang makan dan menemukan manfaat dari penyelesaian itu”.

Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa agenda kebijakan atas pembangunan demokrasi harus sesuai dengan kehendak rakyat melalui pendekatan informal dan

kultural yang efektif mengarahkan pada manfaat dan solusi. Pemerintahan Bersih (PH) *“Pemerintahan yang bersih sama dengan demokrasi adalah syarat mutlak bagi tujuan akhir yaitu Indonesia yang Berdaulat Bersatu Adil, Makmur dan bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia; Demokrasi bagi kami adalah alat atau tangga menuju cita-cita kita yaitu Indonesia yang Kuat dan Sejahtera; Kita ingin Demokrasi yang Produktif bukan Demokrasi yang Destruktif; kita Demokrasi yang bisa membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia, untuk itu Pemerintah yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini.”*(P)

Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa agenda kebijakan atas pemerintahan yang bersih adalah buah demokrasi yang produktif guna mewujudkan Indonesia yang kuat dan sejahtera sesuai amanat konstitusi.

Pemerintahan Bersih (JJK)

“Pemerintahan bersih dilakukan dengan 2 hal yakni pembangunan sistem, seperti yang pernah kita lakukan dan buktikan waktu kami menjadi walikota dan gubernur seperti e-budgeting, e-purchasing, e-catalog, e-audit, pajak online, e-IMB cara seperti itulah yang diperlukan dan bisa dinasionalkan apabila Jokowi JK diberi amanat oleh rakyat untuk memegang pemerintahan ini; kedua adalah pola rekrutmen yang benar dengan cara seleksi dan promosi terbuka semua terseleksi dengan baik sehingga yang memegang pimpinan-pimpinan baik di kementerian, kedirjenan, lembaga-lembaga juga dilakukan dengan seleksi dan promosi terbuka, tidak karena kedekatan dan tidak karena senang dan tidak senang” (JW).

Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa agenda kebijakan atas pemerintahan yang bersih ditempuh dengan cara merancang bangun sistem berbasis elektronis yang saling terintegrasi dengan berbagai pola kebijakan termasuk rekrutmen dan promosi terbuka tanpa faktor kedekatan siapapun.

Kepastian Hukum (PH)

“Kepastian hukum adalah jaminan bagi negara untuk memberikan rasa aman bagi seluruh warganegaraanya; Kami berkomitmen akan bekerja sekeras tenaga untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi dan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dan demikian melestarikan demokrasi yang pada ujungnya membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia”(P).

Dari kedua pernyataan pasangan nomor urut 1 dapat ditafsirkan bahwa agenda kebijakan atas kepastian hukum adalah adanya jaminan rasa aman, penghapusan diskriminasi, pengakuan atas HAM, kesetaraan dimuka hukum demi tegaknya kebenaran dan keadilan bagi seluruh warga

negara.

Kepastian hukum harus memberikan jaminan penghapusan diskriminasi apapun dan harus memberikan penghormatan, pemenuhan dan penegakkan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia. Pemerintahan Prabowo Hatta akan memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga negara setara didepan hukum dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan; Demokrasi bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan tapi ia adalah sistem nilai yang perlu kita tegakkan dan harus diyakini values tersebut akan mengantarkan kita pada kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu demokrasi haruslah mencerminkan 3 hal, pertama bahwa seluruh warga bangsa dapat menyalurkan hak-hak aspirasi dan inspirasi nya tanpa diskriminasi apapun; kedua, Demokrasi harus dapat memberikan suatu hak-hak politik kepada setiap warga negara tanpa ada diskriminatif apapun latar belakangnya apapun agamanya setiap individu harus dijamin hak-hak politiknya; dan ketiga, kita harus memberikan lembaga-lembaga demokrasi berjalan dengan baik, apabila ketiganya berjalan dengan baik kita akan melahirkan demokrasi yang produktif yang menghantarkan rakyat Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan.”(HR).

Kepastian Hukum (JJK)

“Negara hukum semua orang harus taat hukum dan memastikan setiap orang memenuhi aturan dan ketentuan hukum. salah satu syarat kepastian hukum ialah kita menghormati hak asasi manusia; Tanpa HAM pelaksanaan hukum tidak benar; beberapa hal pokok untuk melaksanakannya pertama, hukum yang dapat diterima secara umum, kedua adalah keteladanan para pemimpin; Institusi hukum harus diperkuat dengan baik, KPK harus diperkuat lembaganya, disiplinnya, personilnya, anggarannya demikian pula unsur penegak hukum yang lain, jaksa kepolisian. Tanpa lembaga hukum yang kuat tidak mungkin kita mampu menegakkan hukum; adalah hukum itu sendiri, DPR yang baik harus menata hukum dan menjalankan dengan sebaik-baiknya; Jadi unsur pokoknya adalah hukum, itu sendiri yang membuat hukum DPR dan lembaga hukum lainnya; kita para pemimpin dan yang lain melaksanakannya yang merasakan HAM untuk menjalankan hukum itu, apabila itu semua demokrasi berjalan, pemerintahan yang bersih akan berjalan, pemerintahan yang baik dan bersih akan efektif dalam melayani bangsa ini “(JK).

Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa agenda kebijakan atas kepastian hukum adalah dengan upaya menata aturan hukum dan memperkuat lembaga penegak hukum serta komitmen para pemimpin untuk memberikan teladan atas pelaksanaan hukum

itu sendiri. Setelah dilakukan proses reduksi terhadap transkrip perbincangan dan jawaban kedua pasangan PH dan JJK maka

jawaban atas pertanyaan yang mengarah kepada agenda kebijakan tersebut kemudian disajikan secara ringkas dalam tabel 1 berikut.

Tabel.1 Agenda Kebijakan Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Forum Debat Pilpres 2014.

| AGENDA | Prabowo Subianto - Hatta Rajasa | Joko Widodo - Jusuf Kalla |
|---------------------|---|--|
| Demokrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas demokrasi Indonesia; 2. Indonesia demokrasi terbesar ke-3 dunia; 3. Budaya demokrasi; 4. Pendidikan politik; 5. Hak politik rakyat bukan sebatas pemilu; 6. Hak aspirasi dan inspirasi rakyat tanpa diskriminasi; 7. Hak politik tanpa diskriminasi; 8. Lembaga demokrasi berjalan baik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Esensi demokrasi adalah mendengar dan melaksanakan suara rakyat; 2. Cara demokrasi melalui dialog dan musyawarah untuk kemanfaatan dan solusi atas berbagai masalah. |
| Pemerintahan Bersih | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan bersih buah demokrasi; 2. Pemerintahan bersih mendorong demokrasi yang produktif dan mensejahterakan; 3. Komitmen kerja keras membangun pemerintah bersih. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pemerintahan berbasis e-government; 2. Pola rekrutmen dengan seleksi dan promosi terbuka tidak karena kedekatan. |
| Kepastian Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian hukum demi rasa aman rakyat; 2. Komitmen menjamin kepastian hukum; 3. Jaminan dan penghapusan diskriminasi; 4. Setiap warga negara setara dimuka hukum; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hormati HAM syarat kepastian hukum; 2. Hukum universal; 3. Teladan para pemimpin atas hukum; 4. Penguatan institusi hukum; 5. DPR membuat dan menata hukum. |

sumber: hasil penelitian lapangan, 2014.

Formulasi Kebijakan

Formulasi atau perumusan kebijakan, yakni pengembangan agenda kebijakan dalam suatu analisis yang mendalam terhadap masalah dan strategi program yang dianggap tepat. Dalam konteks Pilpres tahapan ini bisa dilihat dari visi dan misi masing-masing kandidat atau model tanggapan argumentatif atas pertanyaan moderator maupun tanya jawab pasangan 1 dan 2. Terkait dengan itu segmen ke-2 dari debat mengandung pertanyaan yang mengarah

“Kelemahan yang dirasakan bangsa kita sekarang

kepada formulasi atau perumusan kebijakan, dengan pertanyaan moderator berbunyi: “Apa agenda khusus yang akan anda lakukan untuk memperbaiki keadaan ini, yakinkan rakyat bahwa anda orang yang tepat sebagai pendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan, pendukung kuat pemberantasan korupsi, pendorong penegakkan hukum yang adil serta pelindung kuat HAM?”.

Pemerintahan bersih dan efisien (PH)

korupsi, kinerja pemerintah lemah, keadilan berpihak pada yang kuat dan kaya, ini semua adalah suatu akibat dari kebocoran-kebocoran kekayaan nasional yang

besar dengan kebocoran yang besar yang diakibatkan oleh memang masalah sistemik akhirnya tidak ada sumber daya yang cukup untuk menjamin kualitas hidup para pejabat aparatur negara yang menentukan jalannya pemerintahan. Artinya korupsi terjadi di Indonesia karena pejabat yang berkuasa takut masa depan dan masa pensiun. Gaji bupati 6-

7 juta padahal kampanye dia habis 15 M, demikian dimana-mana akibatnya, dia akan ambil dari APBD sama hal menteri-menteri juga begitu, dengan gaji sekitar 18 juta padahal tanggung jawab yang dikelola demikian besar. karena kualitas hidup dan rasa takut ini dan juga sistem demokrasi kita yang begitu liberal, dengan kader di DPR dan departemen, inilah sumber masalah bangsa. Elit kita agak lengah membiarkan sumber daya ekonomi kita terlalu banyak mengalir keluar bangsa kita. Kalau kita ingin memperbaiki mengurangi korupsi kita harus jamin kualitas hidup pejabat, pegawai, penegak hukum harus dijamin kualitas hidupnya. Contoh hakim di Inggris gaji lebih besar dari perdana menteri. Ini strategi besar kami, kami ingin menutup kebocoran”(PS).

Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa formulasi kebijakan atas pemerintahan bersih dan efisien dimulai dengan strategi menutup kebocoran sistemik dari kekayaan nasional yang besar sehingga nantinya tersedia sumber daya yang cukup untuk menjamin kualitas hidup pejabat aparatur negara yang menentukan jalannya pemerintahan, demokrasi dan penegakkan hukum yang pada gilirannya berdampak terhadap pengurangan korupsi, kinerja pemerintah yang tinggi dan keadilan bagi siapapun.

“Jika kita ingin perbaikan disana-sini, ujung-ujungnya kita perlu anggaran. Untuk itulah dibutuhkan peningkatan kemampuan manajerial, teknis dan pendidikan ini semua harus diperbaiki dan butuh investasi yang besar. Rekrutmen orang terbaik dengan sistem yang terbuka, transparansi, penggunaan teknologi informatika terbaru, e-government sebanyak mungkin kita menggunakan teknologi modern kita kurangi kebocoran, dengannya kita punya dana, kita perbaiki kualitas hidup, baru kita hasilkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, berkinerja tinggi, yang melayani dan melindungi rakyat dan hak-haknya. (PS). Kita harus agresif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, karenanya kita harus perkuat KPK. (1) pencegahan, sistem building yang baik, (2) monitor, seluruh institusi harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya.” (HR)

Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan

bahwa formulasi kebijakan atas pemerintahan bersih dan efisien adalah melalui peningkatan kemampuan manajerial, teknis dan pendidikan, rekrutmen orang terbaik dengan sistem berbasis e-government, penguatan KPK dalam agresifitas pemberantasan korupsi, sistem building dan monitoring terhadap akuntabilitas kinerja seluruh institusi pemerintah. Kesinambungan Pembangunan (JJK)

“Perencanaan jangka panjang harus menjadi titik acuan oleh siapapun yang memimpin, karena tanpa itu pembangunan kita akan terpotong-potong tergantung gaya pemimpinnya. Siapun presidennya, yang baik akan dilanjutkan, yang kurang baik kita evaluasi, perbaiki dan dilanjutkan. Tetapi hal-hal yang prinsip dan ideologi akan kita isikan kedalam program-program yang akan dikerjakan. Artinya kita tidak ingin meninggalkan RPJP dan RPJM karena itu adalah titik haluan yang akan dituju bangsa ini. Rencana itu penting tetapi yang lebih penting bagaimana melaksanakannya, eksekusinya dan manajemen pengawasan setiap saat. Paling penting bagi negara adalah hal yang paling lemah yakni manajemen pengawasan.”(JW).

Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa formulasi kebijakan atas kesinambungan pembangunan bertumpu pada RPJP dan RPJM sebagai haluan pembangunan yang akan dituju dan selaras dalam muatan program-program yang dikerjakan kepemimpinan selanjutnya dalam suatu manajemen pengawasan yang ketat, dengan melanjutkan target-target utama bangsa ini dan prinsip-prinsip utama melaksanakan pemerintahan yang demokratis, otonomi daerah, pemerintah terpercaya, dan melaksanakan pemerintahan yang taat hukum. Penegasan kesinambungan pembangunan (JJK)

“Tentu yang harus dilanjutkan adalah target-target utama bangsa ini dan prinsip-prinsip utama melaksanakan pemerintahan yang demokratis, otonomi, memberikan pemerintah yang dipercaya masyarakat, dan melaksanakan pemerintahan yang taat hukum.”(JK).

Setelah dilakukan proses reduksi terhadap transkrip perbincangan dan jawaban kedua pasangan PH dan JJK maka jawaban atas pertanyaan formulas itu disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2 Formulasi Kebijakan Pembangunan Demokrasi,
Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum
Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Forum Debat Pilpres 2014.

| FORMULASI | PRABOWO - HATTA | JOKOWI - JUSUF KALLA |
|--|--|--|
| Sinambungan Pembangunan & Pemerintahan Bersih | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelemahan bangsa atas korupsi, pemerintah lemah, ketidakadilan; 2. Kebocoran kekayaan nasional; 3. Kualitas hidup aparatur rendah mendorong perilaku korupsi; 4. Sistem demokrasi terlalu liberal; 5. Perbaikan butuh anggaran yang besar; 6. Peningkatan kemampuan manajerial; 7. Rekrutmen orang terbaik lewat sistem terbuka, transparan, penggunaan teknologi informasi terbaru; 8. E-government dan teknologi modern; kurangi kebocoran; 9. Perbaiki kualitas hidup; 10. Hasilkan pemerintahan bersih; 11. Pemerintah berkinerja tinggi; 12. Pemerintah melayani dan melindungi rakyat dan hak-haknya; 13. Agresif berantas korupsi melalui penguatan KPK dan institusi penegak hukum lainnya; 14. Sistem building dan monitoring agar seluruh institusi akuntabel. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan jangka panjang jadi acuan siapapun yang memimpin; 2. Perbaiki, evaluasi terhadap kebijakan program masa lalu; 3. Melanjutkan program yang sudah baik; 4. Memberikan muatan prinsip dan ideologi pada setiap program yang dilaksanakan; 5. RPJP dan RPJM adalah haluan untuk tujuan bangsa; 6. Perbaiki ekonomi agar tumbuh baik; 7. Perbaiki defisit dan anggaran; 8. Efisiensi pemerintah atas hal rutin; 9. Reformasi birokrasi; 10. Pembinaan, semangat, pendidikan; 11. Hukum dan pemberantasan korupsi; 12. Pemerintah dibentuk untuk membawa perubahan; 13. Prinsip pokok dijaga spt Tujuan, HAM, hukum, otonomi, pembangunan desa, UKM untuk mencapai pemerintah bersih; 14. Sistem pemerintahan yang transparan, terbuka, diketahui rakyat dalam hubungan demokrasi. |

sumber: hasil penelitian lapangan, 2014.

Selain itu, segmen ke-4 dari debat berupa tanya jawab antar pasangan juga sebagian mencerminkan tahap formulasi, seperti pertanyaan PH kepada JJK yang substansinya tentang: “Bagaimana pilkada yang efisien? dan Apa kriteria pemekaran wilayah yang mencerminkan segi penghematan negara dan keadilan bagi daerah?” Jawaban Formulasi Kebijakan (JJK)

“Kita menjamin proses Pilkada berlangsung efisien, dengan cara penyatuan pilkada sehingga negeri ini hanya ada 3 pemilu serentak, yakni pilpres, pileg, dan pilkada sehingga efisien. Apabila dikembalikan ke DPR belum tentu efisien karena bisa jadi permainannya lebih hebat lagi. (JK); tentu saja banyak harus dikalkulasi, (1) potensi ekonomi yang ada apakah bisa menopang

daerah itu sendiri (PAD) yang bisa menggerakkan pemerintahan disana, (2) apakah rakyat mendapatkan manfaat ketimbang elitnya, (3) luasan, karena daerah yang luas kemudian hanya dipegang oleh satu bupati dalam melayani tidak akan efektif dan efisien, sehingga harus dipertimbangkan, (4) jumlah penduduk, yang sedikit apa bisa diberikan, saya kira bisa saja dengan catatan pemekaran bermanfaat, intinya kemanfaatan, arah kesana bukan keuntungan para elit yang meminta pemekaran.(JW). Tujuan pemekaran adalah wilayah baru memberikan lebih baik kesejahteraan, investasi, pengelola dan demokrasinya, tapi yang penting efektifitasnya memberikan lebih baik atau tidak, jika efeknya baik kita dukung tapi sebaliknya mungkin lebih baik disatukan, jadi penekanan pada azas manfaatnya, kemakmuran, jangkauan pelayanan pemerintah ke daerahnya”. (JK).

Tabel 3 Formulasi Kebijakan Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Forum Debat Pilpres 2014.

| FORMULASI | PERTANYAAN | JAWABAN DAN ARGUMEN |
|---|---|--|
| Segmen 4 Tanya Jawab Tanggapan (-1) | <u>Prabowo-Hatta</u> 1. Bagaimana pilkada yang efisien? 2. Apa kriteria pemekaran wilayah yang mencerminkan segi penghematan 3. negara dan keadilan bagi daerah? | <u>Jokowi - JK</u> 1. Efisiensi pilkada dengan cara penyatuan; 2. Nanti hanya ada 3 Pemilu serentak, yakni Pilpres, Pileg dan Pilkada; 3. Belum tentu efisien bila pilkada dikembalikan ke DPR; 4. Kalkulasi potensi ekonomi, manfaat bagi rakyat, luasan wilayah, jumlah penduduk; 5. Tujuan pemekaran adalah wilayah baru memberikan lebih baik kesejahteraan, investasi, pengelola dan demokrasinya; 6. Penekanan pada azas manfaat, kemakmuran, jangkauan pelayanan pemerintah ke daerahnya. |

sumber: hasil penelitian lapangan, 2014.

Adopsi Kebijakan

Adopsi Kebijakan yakni tahapan ke-3 dari proses kebijakan adalah suatu pengembangan dukungan terhadap usulan kebijakan yang telah diformulasikan sehingga dapat diakui menjadi kebijakan resmi. Dalam konteks ini baik pasangan 1 dan 2 menyadari bahwa pemenang diantara mereka berpeluang mengadopsi visi dan misinya dilegitimasi dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahun kedepan. Oleh karena itu, momentum kampanye Pilpres merupakan kesempatan untuk meyakinkan sekaligus meraih simpati pemilih sehingga memberikan suatu legitimasi sosial terhadap gagasan dalam adopsi kebijakan mereka, sebelum melangkah pada legitimasi hukum dan politik yang lebih definitif nantinya.

Segmen ke-6 dari debat, substansi pertanyaan dan jawaban cenderung mengarah kepada tahap adopsi kebijakan sebagaimana implisit ditanyakan moderator: "Kami minta anda meyakinkan seluruh rakyat di negeri ini, Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa adopsi kebijakan untuk meyakinkan rakyat melalui komitmen kerja keras berdasarkan pengalaman memimpin birokrasi, membaktikan diri dan mendedikasikan hidup

bahwa dibawah kepemimpinan anda jika terpilih, bangsa dan negara Indonesia akan lebih baik kondisinya dari pada hari ini dalam hal demokrasi, pemerintahan bersih dan negara hukum".

Adopsi Kebijakan (JJK)

"*Sesuai dengan pengalaman yang telah kita lakukan dan pengalaman yang telah kita buktikan apabila rakyat memberikan kepercayaan kepada kami, maka kami akan bekerja keras, bekerja sangat keras, siang malam agar demokrasi berjalan lebih baik, pemerintahan yang bersih bisa kita hadirkan, kepastian hukum yang tegas bisa kita berikan. Kedua, terimakasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung, sehingga demokrasi dapat berjalan dalam kegembiraan, dan kita harapkan Pilpres nantinya bisa berjalan dalam kegembiraan rakyat. Terimakasih saya sampaikan kepada Ibu saya yang mendoakan saya, istri saya, ibu mufidah JK, anak2 saya, putraputri bapak JK yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam rangka membaktikan diri, mendedikasikan hidup kami untuk rakyat, untuk bangsa dan untuk negara. Pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum adalah hal yang utama, kalau presiden nomor dua.*" (JW)

untuk rakyat, bangsa dan negara dalam membangun demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum.

Adopsi Kebijakan (PH)

“Tujuan kita bernegara tujuan kita merdeka adalah untuk hidup sebagai bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Tetapi kalau kekayaan kita tidak tinggal direpublik kita, kalau kekayaan kita bocor terus keluar, walaupun kita punya sistem demokrasi yang indah, tetapi ujungnya kesejahteraan rakyat sulit dicapai. Jadi, kami apabila menerima mandat dari rakyat, kami akan bekerja keras, yang pertama adalah untuk menyelamatkan kekayaan bangsa dan negara, sehingga demokrasi yang kita bangun akan berarti demokrasi yang produktif, demokrasi yang memberi kebaikan dan perbaikan hidup bagi bangsa Indonesia, bukan demokrasi wani piro, bukan demokrasi kearah destruktif, dengan demikian, dengan menyelamatkan kekayaan negara guna menyelamatkan masa depan generasi, kita meyakini bahwa kita nanti memiliki masa depan yang baik. Kita optimis, karena kita memiliki kekayaan yang besar, pemerintahan yang bersih, dengan niat dan kehendak politik yang keras untuk meminimalkan korupsi, memberantas korupsi, menghasilkan manajemen yang baik, jasa-jasa kepada rakyat segera yang dibutuhkan rakyat, yang ujungnya juga akan tercipta kepastian hukum yang mantap bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, kami yakin bahwa dengan komitmen yang kuat kita dapat mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka yang produktif, kita tidak mau hanya jadi pasar bagi orang lain, kita tidak mau hanya memasok tenaga kerja murah, kita tidak mau kaum wanita kita kerja sebagai pembantu di negeri jauh, kita ingin rakyat hidup sejahtera cukup sandang, pangan, papan, kita ingin berdiri diatas kaki sendiri, kita ingin menjadi negara yang terhormat, dengan rakyat yang sejahtera dan rakyat yang tenang menghadapi masa depan. Terima kasih” (PH).

Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa adopsi kebijakan atas upaya meyakinkan dan meraih dukungan rakyat untuk dilegitimasi karena berkomitmen kuat menyelamatkan kekayaan negara dan masa depan generasi penerus sehingga optimisme terbangun mewujudkan tujuan merdeka dan bernegara yakni bangsa yang adil, makmur dan sejahtera.

Setelah dilakukan proses reduksi terhadap transkrip perbincangan dan jawaban kedua pasangan PH dan JJK maka jawaban atas pertanyaan yang mengarah kepada adopsi kebijakan tersebut kemudian disajikan secara ringkas dalam tabel 4 berikut.

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan yakni penerapan kebijakan oleh pemerintah dengan menggerakkan sistem administrasi negara. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan

adalah konsekuensi dari kemenangan dalam kontestasi Pilpres sehingga siapapun pemenangnya harus dapat menerapkan kebijakan sebagai aktualisasi dari janji-janji politik saat kampanye. Namun, implementasi kebijakan dalam format debat kali ini juga tercermin dari segmen pertanyaan kepada pasangan 1 dan 2 terkait langkah-langkah nyata mereka atas tema debat.

Segmen ke-3 dari debat, substansi pertanyaan dan jawaban cenderung mengarah kepada tahap implementasi kebijakan sebagaimana eksplisit ditanyakan moderator: “Bila anda terpilih, apa langkah-langkah nyata yang akan anda lakukan untuk menjadikan pemerintahan anda bersih, efektif serta stabil pada saat yang sama mampu menghindari rongrongan parpol yang mendukung anda, dengan meminta anda membalas budi dengan memberikan kemudahan untuk mendapatkan uang?”. **Implementasi Kebijakan (PH)**

“Adagium bahwa tidak ada pengikut yang jelek, hanya ada pemimpin yang jelek. Jika kita sebagai pemimpin bisa tegas meyakinkan mitra kita, anggota kita bahwa kita bergabung dengan syarat tidak akan merongrong APBN/APBD satu sen pun, ini adalah syarat saya kepada mitra-mitra saya, dan disemua partai banyak kader-kader yang baik, disemua partai banyak pengabdian kepada bangsa dan negara menjadi motif kita, jadi kita sepakat APBN/APBD tidak kita kurangi sedikit pun, lantas bagaimana membiayai demokrasi, saya sangat percaya ekonomi kita sangat besar potensi dan kekayaannya, kita harus mewujudkan suasana masyarakat modern. Bahwa masyarakatlah yang harus merasa ingin menyumbang kepada parpol nya, inilah strategi kita untuk mengajak kader berjuang mendukung partai (PH); “Presiden dipilih langsung oleh rakyat, karenanya presiden memegang amanat rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat bukan parpol, oleh karenanya jangan pernah permisif dan tunduk pada apa yang diinginkan parpol koalisi. Karenanya tegas menjalankan pemerintahan sesuai visi misi, RPJM, dan RPJP. kedua, kita jangan menempatkan pemilihan personil menteri dan pejabat penting didasarkan alokasi parpol, ini harus tegas dan dijadikan budaya siapapun presidennya, karenanya penting memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik dengan bahasa lain adalah kabinet ahli. ketiga Pilkada dan Pileg yang sarat dengan uang, karenanya kami bertekad akan menyempurnakan ini, demokrasi harus sederhana, murah dan tidak membebani rakyat. Demokrasi harus menghasilkan putra-putri terbaik menjadikan legislatif, kepala daerah, dan kepala negara untuk demokrasi yang betul-betul menjadi jalan bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran”.(HR).

Tabel 4. Adopsi Kebijakan Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Forum Debat Pilpres 2014.

| ADOPSI | PRABOWO - HATTA | JOKOWI - JUSUF KALLA |
|--|--|--|
| Kami minta anda meyakinkan seluruh rakyat di negeri ini, bahwa dibawah kepemimpinan anda jika terpilih, bangsa dan negara Indonesia akan lebih baik kondisi nya daripada hari ini dalam hal demokrasi, pemerintahan bersih dan negara hukum. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan kita bernegara dan merdeka adalah untuk hidup sebagai bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera; 2. Bekerja keras, menyelamatkan kekayaan negara dari kebocoran; 3. Demokrasi yang produktif, demokrasi yang memberi kebaikan dan perbaikan hidup bagi bangsa Indonesia; 4. Menyelamatkan kekayaan negara guna menyelamatkan masa depan generasi; 5. Optimis, karena memiliki kekayaan bangsa yang besar, pemerintahan yang bersih, dengan niat dan kehendak politik yang keras untuk memberantas korupsi, menghasilkan manajemen pemerintah yang baik; 6. Akan tercipta kepastian hukum yang mantap bagi seluruh rakyat Indonesia; 7. Komitmen yang kuat menjadi bangsa yang merdeka dan produktif; 8. Keinginan rakyat hidup sejahtera cukup sandang, pangan, papan; 9. Berdiri diatas kaki sendiri, menjadi negara yang terhormat, dengan rakyat yang sejahtera dan tenang menghadapi masa depan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja keras, siang malam agar demokrasi berjalan lebih baik, pemerintahan yang bersih bisa kita hadirkan, kepastian hukum yang tegas bisa kita berikan. 2. Terimakasih atas dukungan rakyat sehingga demokrasi dapat berjalan dalam kegembiraan; 3. Terimakasih atas dukungan keluarga; 4. Membaktikan diri, mendedikasikan hidup kami untuk rakyat, bangsa dan negara; 5. Pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum adalah hal yang utama, kalau presiden nomor dua. |

sumber: hasil olah data penelitian, 2014.

Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa implementasi kebijakan atas pemerintah bersih, efektif dan stabil tanpa rongrongan parpol didasari prasyarat awal kepada mitra-mitra untuk tidak merongrong APBN dan APBD karena motifnya adalah pengabdian kepada bangsa dan negara, bertanggung jawab kepada rakyat bukan parpol, tegas menjalankan pemerintahan sesuai RPJM dan RPJP, menempatkan orang terbaik di kabinet ahli tanpa didasari alokasi parpol, dan demokrasi sederhana dan murah sebagai jalan bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran.

Implementasi Kebijakan (JJK)

“Parpol harus berani merombak, ada cara baru di parpol kita yakni mencalonkan yang terbaik. Contohnya kami, saya bukan pengurus partai, tetapi saya dicalonkan karena ada rekam jejak dan prestasi. Sejak awal kami sampaikan bahwa kami akan membangun kabinet kerjasama yang ramping, tidak perlu banyak parpol tetapi yang penting dalam bekerja kita mengedepankan kepentingan rakyat, bukan membagi-bagi menteri, kursi, kue di depan, tetapi yang lebih penting adalah sejak awal kita sampaikan koalisi kerjasama yang ramping ini untuk menghindari bagi- bagi kursi. Dalam melaksanakan kampanye kami juga ingin mendapatkan dukungan rakyat dari sisi pendanaan karenanya kami membuka rekening sumbangan rakyat yang akan diaudit sehingga kami tidak bisa ditekan siapapun. Kami punya rekam jejak untuk itu (JW).

“Kita menyadari bahwa biaya politik kita

mahal begitu banyak Pilkada, Pemilu dinegeri ini maka yang perlu kita perbaiki sistem itu sendiri. Bagaimana pilkada disatukan agar lebih efisien. Bagaimana rekrutmen menjadi hal yang sangat penting bagaimana caranya tidak seperti yang lalu. Filosofi yang berbeda dari kami, kami bersyukur parpol pendukung kami tidak ada janji siapa menjabat apa, itu yang membuat kami biaya murah sehingga tidak ada tekanan. Pengalaman kita semua, kami bersyukur parpol tidak banyak dan ikhlas sehingga semua ini akan membentengi berbagai hal dan dugaan negatif.(JK). Tradisi yang baru harus kita mulai, bahwa yang menjadi capres tidak harus ketua parpol baru yang harus kita mulai yang saya kira nanti yang maju memang yang terbaik bukan ketua parpol.”(JW).

Setelah dilakukan proses reduksi terhadap transkrip perbincangan dan jawaban kedua pasangan PH dan JJK maka jawaban atas pertanyaan yang mengarah kepada implementasi kebijakan tersebut kemudian disajikan secara ringkas dalam tabel 3.5 berikut.

Segmen ke-5 dalam debat ini juga cenderung mengarah kepada persoalan implementasi kebijakan yang secara eksplisit ditanyakan moderator: “Apa saja langkah konkrit anda untuk keluar dari permasalahan tata pemerintahan tersebut sehingga visi misi anda dapat terlaksana sebagaimana anda rencanakan?”. Jawaban rinci dari masing-masing pasangan Capres dan Cawapres adalah sebagai berikut.

Implementasi Kebijakan (JJK)

“Pertama daerah yang tidak mengikuti pusat, kedua lembaga overlap dan peraturan tumpang tindih, dan ketiga kualitas birokrasi. (1) daerah bisa ikuti 100% dengan arahan pusat dengan cara apa? dengan politik anggaran, karena 85% anggaran daerah berasal dari pusat. oleh

sebab itu dengan politik anggaran kita bisa kendalikan daerah. Jika tidak mau berikan punishment kalau ada prestasi berikan insentif/reward. Gampang sekali, hal sederhana yang tsering tidak dilakukan. Misalnya masalah pembangunan, pelayanan terpadu satu pintu, daerah diperintah semua membuat itu, kalau tidak bisa DAK nya dipotong atau DAK dikurangi itu sudah buat daerah mengerikan. Inilah politik anggaran yang akan kita jalankan agar daerah seiring sejalan dengan pusat. (2) peraturan tumpang tindih, apabila peraturan lewat satu pintu di Setneg kembalikan lagi kesana, keluarannya akan jelas. Tetapi bila semua kementerian bisa mengeluarkan aturan lewat pintu yang tidak jelas, maka banyak peraturan yang betentangan dengan pusat, pergub yang tidak sinkron, oleh sebab itu pintunya harus diberi satu, sehingga keluarannya akan kelihatan seiring sejalan dengan arah yang telah digariskan pemerintah pusat. (3) kualitas birokrasi, tadi sudah kami sampaikan, ini sebetulnya sesuatu yang tidak sulit-sulit amat, sesuatu yang sederhana, tapi kita sering pesimis, tapi kami dan pak JK optimis, karena SDMnya baik-baik pinter- pinter ada Doktor, Magister, Sarjana, banyak sekali kenapa tidak berjalan baik, sekali sistem tidak dibangun, tadi sudah disampaikan e-gov semuanya dari e- bugeting, e-purchasing, e-audit, semuanya harus dibangun. kalau itu dilakukan kita bisa mudah mengawasi, panggil saja programer melakukan itu, 2 minggu bisa dirampungkan, Tidak ada masalah, yang penting optimis, jangan pesimis. Kualitas birokrasi masalah pola rekrutmen yang harus kita cari terbaik,yaitu dengan seleksi dan promosi terbuka. Hal sederhana yang tidak dilakukan, masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau, itu saja.” (JW).

Tabel 5 Implementasi Kebijakan Pembangunan Demokrasi,
Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum
Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Forum Debat Pilpres 2014.

| IMPLEMENTASI | PRABOWO - HATTA | JOKOWI - JUSUF KALLA |
|--|--|--|
| Segmen 3 pemerintah bersih tanpa rongrongan parpol pendukung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adagium tidak ada pengikut yang jelek hanya ada pemimpin yang jelek; 2. Syarat kerjasama parpol tidak akan merongrong APBN/APBD; 3. Disemua parpol banyak kader yang baik dengan motif mengabdikan bagi bangsa dan negara; 4. Biaya partai dari sumbangan masyarakat dan kader; 5. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, jangan permisif dan tunduk pada parpol; 6. Jalankan pemerintah sesuai visi misi, RPJM dan RPJP; 7. Jangan menempatkan pemilihan menteri dan pejabat didasarkan alokasi parpol; 8. Demokrasi sederhana, murah, dan tidak membebani rakyat; 9. Demokrasi menghasilkan putra-putri terbaik sebagai pemimpin legislatif, kepala daerah dan kepala negara. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Parpol harus berani merombak dengan cara baru yakni mencalonkan yang terbaik bukan ketua parpol; 2. Bangun kabinet kerja sama yang ramping, hindari bagi-bagi kursi; 3. Tidak perlu banyak parpol yang penting bekerja untuk rakyat; 4. Kampanye didukung rakyat lewat rekening yang siap diaudit pihak berkompeten; 5. Pilkada disatukan pelaksanaannya akan jauh lebih efisien; 6. Tidak ada janji dalam parpol kami tentang siapa menjabat apa; 7. Biaya demokrasi murah membuat tiada tekanan; 8. Parpol pendukung tidak banyak dan ikhlas, mampu membentengi dari berbagai hal dan dugaan yang negatif. |

sumber: hasil analisis 2014.

“Saya ingin tambahkan bahwa itulah tugas pemimpin, meyakinkan dibawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang sama sesuai dengan ketentuan. Kalau pemimpin tidak sanggup berarti bukan pemimpin yang baik. Jadi jangan salahkan daerahnya. Selama pusat melaksanakan dengan baik, daerah juga dapat melaksanakan. Partai harus menjadi ketaatan kedua setelah pemerintah, yang bertujuan bernegara. Menjaga semua sistem berjalan, sehingga pusat punya instrumen fiskal, kebijakan dan pengawasan. Ada BPK, BPKP yang mengawasi kalau tidak sejalan dengan pusat. Kita mengalami begitu banyak lembaga-lembaga, negeri ini sudah otonomi berarti lembaga pusat harus berkurang dibanding lembaga di daerah. Pusat tidak perlu banyak” (JK).

Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa implementasi kebijakan atas kepatuhan daerah terhadap pusat, tumpang tindih aturan,

dan kualitas birokrasi dilakukan dengan menerapkan politik anggaran, peraturan satu pintu lewat fungsi Sekretariat Negara, kualitas birokrasi berbasis *e-government* dan pola rekrutmen terbaik, seleksi dan promosi terbuka, menjaga sistem berjalan lewat instrumen fiskal, kebijakan dan pengawasan.

Implementasi Kebijakan (PH)

“Kami sadar sepenuhnya bahwa setiap usaha perbaikan, tiap transformasi pasti ada halangan dan kita sudah mengerti halangan tersebut tumpang tindih peraturan, para pemimpin politik yang mungkin berasal dari latarbelakang dan kepentingan yang berbeda, tapi saya pikir ada strategi tertentu untuk mengatasi kondisi ini, (1) kita harus memilih beberapa sektor yang paling menentukan, kita tidak bisa memperbaiki keadaan sekaligus di seluruh sektor. kita harus pandai memilih sektor mana yang merupakan kunci yang akan

mempengaruhi sektor- sektor lain, dan setelah itu kita harus menentukan sasaran/objective, atau sering disebut Management By Objective, tentukan sasaran lalu ambil langkah-langkah menuju sasaran. Sasaran tidak perlu banyak, kita tentukan misalnya Pangan dengan ketahanan dan keswasembadaan pangan, kita bisa dapatkan yang lain seperti keamanan, ketenangan, optimisme rakyat, hemat devisa, kita bisa investasi- roda ekonomi jalan - kesejahteraan umum naik. Kami sudah menentukan pangan, energi, infrastruktur, reformasi birokrasi adalah sasaran pokok yang harus diselesaikan dahulu. (2) kemudian kita jangan lupa sekarang the power of public opinion, opini rakyat sangat menentukan, opini rakyat bila kita bertujuan baik bisa diselesaikan dengan dialog dan persuasi, dan dengan opini dari rakyat pada gilirannya para penguasa-penguasa setempat akan dipaksa oleh rakyatnya, karena yang kita inginkan adalah menyampaikan hal-hal dasar bagi rakyat, air bersih, makan murah, rumah sakit yang terjangkau, sekolah yang baik, jalan yang bagus dari desa ke kab - prov, ke pelabuhan, kereta api, jalan raya, tidak mungkin rakyat tidak mendukung.” (PS).

“Saya akan mendalami hal yang sangat penting bagi bangsa kita, yaitu reformasi birokrasi, acapkali hambatan yang kita hadapi adalah buruknya birokrasi, apakah karena wawasan organisasi yang tidak baik, aparatur yang tidak bersih karena sistem promosi jabatan dan rekrutmen yang tidak transparan dan akuntabel, dan juga lembaga institusi layanan publik yang tidak baik, karena tidak ada ukuran- ukuran yang pasti sehingga pelayanan publik menjadi bertele-tele, mahal dan melelahkan karenanya langkah reformasi birokrasi harus dituntaskan dengan baik, (1) organisasi efektif efisien, jangan gemuk yang berakibat birokrasi bertele-tele (2) bagaimana upaya kita untuk meletakkan asas akuntabilitas dengan berbasis kepada kinerja. Tidak ada satupun kebijakan yang dijalankan yang tidak bisa diukur akuntabilitasnya.(3) upaya pemberantasan korupsi harus masif, pencegahan dan penguatan KPK, Jaksa dan Polisi harus dilakukan dengan baik agar apa-apa yang sudah menjadi kebijakan tidak

diselewengkan begitu saja, (4) sumber daya manusia aparatur itu sendiri yang harus diperbaiki baik jumlahnya yang tidak didesain sesuai struktur organisasi harus dipangkas, dan (5) mencegah kebocoran keuangan negara. Jadi bila ini bisa diperbaiki maka hambatan tersebut dapat kita atasi.” (HR).

Dari pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa implementasi kebijakan atas tata pemerintahan dengan prioritas pada sektor kunci yang berdampak luas bagi sektor lain dengan sasaran pokok adalah pangan, energi, infrastruktur dan reformasi birokrasi.

Setelah dilakukan proses reduksi terhadap transkrip perbincangan dan jawaban kedua pasangan PH dan JJK maka jawaban atas pertanyaan yang mengarah kepada implementasi kebijakan tersebut kemudian disajikan secara ringkas dalam tabel 6 berikut.

Tabel.6 Implementasi Kebijakan Pembangunan Demokrasi,
Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum
Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Forum Debat Pilpres 2014.

| IMPLEMETASI | PRABOWO - HATTA | JOKOWI - JUSUF KALLA |
|---|--|---|
| Apa saja langkah konkrit anda untuk keluar dari permasalahan tata pemerintahan tersebut sehingga visi misi anda dapat terlaksana sebagaimana anda rencanakan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan sektor prioritas yang menjadi kunci bagi tercapainya sasaran yang lain; 2. Sasaran pokok adalah Pangan, energi, infrastruktur dan reformasi birokrasi ; 3. Opini rakyat sangat menentukan (the power of public opinion) guna 'memaksa' pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan dan program pusat terkait pemenuhan kebutuhan dasar warga negara spt kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dsb; 4. Reformasi birokrasi dengan cara (a) organisasi efektif efisien/tidak gemuk/tidak bertele; (b) akuntabilitas berbasis kinerja; (c) pemberantasan korupsi secara masif; (d) perbaikan aparatur; (e) mencegah kebocoran uang negara. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah bisa ikuti 100% arahan pusat dengan cara politik anggaran, karena 85% anggaran daerah berasal dari pusat; 2. Peraturan agar tidak tumpang tindih, harus melalui satu pintu di Setneg; 3. Kualitas birokrasi, dengan membangun sistem e-gov semuanya dari e-bugeting, e-purchasing, e-audit, dll; 4. Pola rekrutmen dengan cara seleksi dan promosi terbuka; 5. Selama pusat melaksanakan dengan baik, daerah juga dapat melaksanakan; 6. Partai harus menjadi ketaatan kedua setelah pemerintah, yang bertujuan bernegara; 7. Menjaga semua sistem berjalan, sehingga pusat punya instrumen fiskal, kebijakan dan pengawasan; 8. Ada BPK, BPKP yang mengawasi kalau tidak sejalan dengan pusat; 9. Otonomi berarti lembaga pusat harus berkurang dibanding lembaga di daerah. |

sumber: hasil analisis, 2014.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan yakni upaya pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan terlaksana efektif dan mengapa tidak. Dalam kaitan ini pemenang Pilpres harus siap mendapat sorotan publik dan berbagai elemen ekosistem negara dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, karenanya sistem evaluasi kebijakan di lingkungan pemerintah harus dapat bekerja guna memastikan berbagai pelaksanaan program kebijakan berjalan efektif. Namun, evaluasi kebijakan juga dimaknai oleh pasangan 1 dan 2 dengan cara mengkritisi kebijakan pemerintah sebelumnya yang terungkap dalam perdebatan Pilpres maupun selama kampanye berlangsung.

Segmen ke-2 dari debat, substansi pertanyaan dan jawaban cenderung mengarah kepada tahap evaluasi kebijakan sebagaimana eksplisit ditanyakan moderator: "Dapatkah anda melakukan evaluasi kritis terhadap program-program kerja yang telah dilaksanakan saat ini dan evaluasinya."

Evaluasi Kebijakan (PH)

"Kelemahan yang dirasakan bangsa kita sekarang korupsi, kinerja pemerintah lemah, keadilan berpihak pada yang kuat dan kaya, ini semua adalah suatu akibat dari kebocoran-kebocoran kekayaan nasional yang besar dengan kebocoran yang besar yang diakibatkan oleh memang masalah sistemik akhirnya tidak ada sumber daya yang cukup untuk menjamin kualitas hidup para pejabat aparatur negara yang menentukan jalannya pemerintahan. Artinya korupsi terjadi di Indonesia karena pejabat yang berkuasa takut masa depan dan masa pensiun. Gaji bupati 6-7 juta padahal kampanye dia habis 15 M, demikian dimana-mana

akibatnya, dia akan ambil dari APBD sama menteri2 juga begitu, dengan gaji sekitar 18 juta padahal tanggung jawab yang dikelola demikian besar. karena kualitas hidup dan rasa takut ini dan juga sistem demokrasi kita yang begitu liberal, dengan kader di DPR dan departemen, inilah sumber masalah bangsa. Elit kita agak lengah membiarkan sumber daya ekonomi kita terlalu banyak mengalir keluar bangsa kita. Kalau kita ingin perbaiki mengurangi korupsi kita harus jamin kualitas hidup pejabat, pegawai, penegak hukum harus dijamin kualitas hidupnya. Contoh hakim di Inggris gaji lebih besar dari perdana menteri.”

Evaluasi Kebijakan (JJK)

“Dalam hal-hal kebijakan menyangkut lima tahunan yang perlu dievaluasi contohnya adalah: ekonomi yang merosot, defisit banyak, anggaran tidak berfungsi dengan betul, kondisi minyak menurun, maka pemerintahan yang akan datang harus memperbaiki kebijakan itu, tanpa itu negara tidak bisa berkembang. Kalau pada dewasa ini sebelumnya ekonomi kita tumbuh 7% sekarang melorot 5% semua itu harus dikoreksi hingga mencapai pertumbuhan yang lebih baik lagi. Efisiensi pemerintah yang lebih mementingkan rutin yang tidak penting, itu harus direformasi karena itu bagian dari kita mencapai tujuan, dari sisi pembinaan, semangat, dari pendidikan, hukum dan pemberantasan korupsi, harus tegas semuanya itu hal-hal yang harus dilakukan pemerintah yang akan datang, karena pemerintahan dibentuk untuk membawa perubahan. Tanpa ada perubahan tentu bukanlah pemerintah yang baik untuk mencapai tujuan itu. Namun prinsip pokok harus dijaga, prinsip pokok tujuan, HAM, hukum, otonomi (memberi kewenangan yang baik bagi daerah), pembangunan desa, UKM karena pokok persoalan kesejahteraan bangsa ini, tanpa itu semua kita tidak bisa mencapai pemerintah yang bersih, pemerintah bersih yang efektif dalam melayani. Sistem pemerintah apa yang baik adalah yang transparan, terbuka, yang rakyat mengetahui itulah hubungannya dengan azas demokrasi kita” (JK).

Pada segmen ke-4 dalam tanya jawab antar pasangan, Cawapres nomor urut 2 mengarahkan pertanyaan evaluatif dengan menyinggung masalah HAM yang selama ini menjadi stigma khusus bagi Capres nomor urut 1, dengan pertanyaan:”Bagaimana mengatasi pelanggaran HAM di masa lalu dan menjaga HAM dimasa datang?.

Evaluasi Kebijakan (PH)

“HAM yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Kemudian tugas UUD yang diberikan kepada sebuah pemerintahan RI adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Sebuah pemerintah harus melindungi

dari segala ancaman dari luar negeri atau dalam negeri. Saya sekian puluh tahun adalah abdi negara, petugas yang membela HAM, mencegah kelompok radikal atau yang menggunakan kekerasan mengancam keselamatan hidup orang2 yang tidak bersalah. Kita menghadapi kelompok yang ingin menimbulkan huru hara yang mengancam kelangsung hidup bangsa dan negara, yang mereka ini ancaman HAM itu.

Kewajiban seorang petugas adalah melindungi segenap tumpah darah dari ancaman tsb. Dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit, dilaksanakan dengan sebaiknya yang menilai adalah atasan, saya mengerti arah bapak, tidak apa-apa tetapi saya ada disini, saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas dengan sebaik2 nya, selebihnya atasan yang menilai, apakah saya (kira2 dimaksud JK) tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM? padahal bapak tidak mengerti bahwa kami2 ini berada ditempat susah dimana-mana sering ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia. Jadi pak JK, saya bertanggung jawab, dan hati nurani saya bersih, saya pembela HAM yang paling keras di republik ini. “(PS)

Masih dalam segmen ke-4, pasangan nomor urut 2 masih mengejar penjelasan dari rival nya dengan mengajukan 2 pertanyaan tanggapan yang substansinya adalah sebagai berikut: Belum terjawab soal diskriminasi, konkrit pelaksanaan HAM dan penanganan diskriminasi. (JW); Semua pelanggar HAM itu karena bom, terserah penilaian atasan, apakah penilaian atasan bapak tentang penyelesaian HAM di masa itu?

Tanggapan Evaluasi Kebijakan (PH)

“Langkah konkrit diujungnya adalah pendidikan, masalah HAM adalah pendidikan di semua sektor, aparat, pejabat, karena sering petugas diberi perintah kemudian kalau ada sesuatu yang nanti dinilai tidak tepat atau secara politis tidak menguntungkan akhirnya petugas yang disalah. Jadi kuncinya di pendidikan, butuh investasi. Diskriminasi harus dilawan tapi ujungnya adalah pendidikan. Kepada pak JK, kita bertanggung jawab kepada atasan kita, penilaian ada di atasan, kalau bapak ingin tanya, tanyakan kepada atasan saya saat itu. (PS), Soal diskriminasi yang mendasar menyangkut hak-hak warga negara, dalam konteks diskriminasi hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, siapapun harus sama di muka hukum. Apakah akses kepada sumber2 kemakmuran, pendidikan, lahan, dsb masih banyak terjadi diskriminasi perlakuan, sehingga ini menjadi perhatian yang serius dari kami apabila mendapat mandat dari rakyat” (HR).

Tabel 7. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum Pasangan Capres dan Cawapres 2014

| | PERTANYAAN | JAWABAN/ARGUMENTASI |
|-------------------------------------|---|--|
| Segmen 4 Tanya Jawab Tanggapan (-2) | <p><u>Jokowi - JK</u> Bagaimana mengatasi pelanggaran HAM di masa lalu dan menjaga HAM dimasa datang?</p> | <p><u>Prabowo-Hatta</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HAM yang paling dasar adalah hak untuk hidup; 2. HAM adalah amanat konstitusi; 3. Pemerintah harus mampu melindungi rakyatnya dari segala ancaman luar negeri atau dalam negeri; 4. Saya adalah abdi negara, petugas yang membela HAM, mencegah kelompok radikal atau yang menggunakan kekerasan mengancam keselamatan hidup orang2 yang tidak bersalah; 5. Kita menghadapi kelompok yang ingin menimbulkan huru hara yang mengancam kelangsung hidup bangsa dan negara, yang mereka ini ancaman HAM itu; 6. Kewajiban seorang petugas adalah melindungi segenap tumpah darah dari ancaman tsb. 7. Dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit, dilaksanakan dengan sebaiknya yang menilai |
| Segmen 4 Tanya Jawab Tanggapan (-3) | <p><u>Jokowi</u></p> <p>Belum terjawab soal diskriminasi, konkrit pelaksanaan HAM dan penanganan diskriminasi. (JW), <u>JK</u> Semua pelanggar HAM itu karena bom, terserah penilaian atasan, apakah penilaian atasan bapak tentang penyelesaian HAM di masa itu?</p> | <p><u>Prabowo - Hatta</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah konkrit diujungnya adalah pendidikan; 2. Masalah HAM adalah pendidikan di semua sektor, aparat, pejabat, karena sering petugas diberi perintah kemudian kalau ada sesuatu yang nanti dinilai tidak tepat atau secara politis tidak menguntungkan akhirnya petugas yang disalah; 3. Jadi kuncinya di pendidikan, butuh investasi; 4. Diskriminasi harus dilawan tapi ujungnya adalah pendidikan; 5. Soal diskriminasi yang mendasar menyangkut hak-hak warga negara, siapapun harus sama di muka hukum; 6. Apakah akses kepada sumber2 kemakmuran, pendidikan, lahan, dsb masih banyak terjadi diskriminasi perlakuan, sehingga ini menjadi perhatian yang serius dari kami apabila mendapat mandat dari rakyat; 7. Kita bertanggung jawab kepada atasan kita, penilaian ada di atasan, kalau bapak ingin tanya, tanyakan kepada atasan saya saat itu. |

Sumber: hasil analisis, 2014

Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan kajian pada gagasan kebijakan secara konseptual yang dirilis dalam agenda kebijakan berupa visi misi dan program kedua pasangan Capres-Cawapres RI 2014 terhadap gagasan kebijakan secara kontekstual yang berkembang dalam Debat Capres putaran pertama yang bertema “Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum”, maka disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

- Gagasan tentang pembangunan demokrasi secara eksplisit dinyatakan dari perspektif strategis dan taktis kedua pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 dan 2 dalam sesi Debat Capres putaran pertama namun tidak dinyatakan secara konkrit didalam agenda kebijakan dan program prioritas tertulis kedua pihak. Arah gagasan demokrasi kedua pihak cenderung sama yakni menekankan pada pentingnya peningkatan dan perbaikan demokrasi yang lebih murah, sederhana, bermutu, produktif, nondiskriminatif, mensejahterakan dan menggembirakan rakyat;
- Gagasan tentang pemerintahan bersih secara eksplisit dinyatakan secara umum dan khusus kedua pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 dan 2 dalam sesi Debat Capres putaran pertama dan termuat dalam agenda kebijakan tertulis dari pasangan Capres nomor urut 2, sedangkan Capres nomor urut 1 lebih menggunakan pendekatan pemerintah efektif. Namun substansi komitmen dan strategi kebijakan kedua pihak relatif sama yakni penekanan kepada sistem birokrasi yang transparan, akuntabel dan efektif melayani;
- Gagasan tentang kepastian hukum secara eksplisit dinyatakan kedua pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 dan 2 baik didalam forum debat maupun didalam agenda kebijakan tertulis mereka perbedaan substansi kepastian hukum dari segi hasil bagi Capres 1 yakni terpenuhinya rasa aman dan keadilan bagi siapapun dimuka hukum sedangkan bagi Capres 2 dari segi

proses yakni membenahi produk hukum dan penguatan lembaga hukum.

Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

- Pembangunan demokrasi yang sesuai prinsip demokrasi universal dan jatidiri bangsa harus dikelola oleh pemerintah yang bersih guna menghasilkan demokrasi yang lebih baik, karenanya siapapun yang mengemban amanat ini perlu memperhatikan proses kebijakan yang menyeluruh terkait agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan demokrasi nasional;
- Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dapat diwujudkan dengan upaya sungguh-sungguh didalam memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan, membangun transparansi tata kelola pemerintahan; menjalankan reformasi birokrasi; memangkas rantai birokrasi dan membuka partisipasi publik yang luas terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah;
- Kepastian hukum tanpa pandang bulu dan seadil-adilnya dapat diwujudkan didalam negara hukum yang demokratis dengan pemerintahan yang bersih, melalui komitmen dan upaya serius didalam: Mencegah dan memberantas korupsi dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel; Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis; Membangun politik legislasi; Memberantas mafia peradilan; Memberantas tindakan bisnis ilegal; Pemberantasan narkoba dan psikotropika; Pemberantasan tindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang; Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah; Melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal; Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu; dan Membangun budaya hukum di seluruh lapisan masyarakat.

Referensi

- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Bridgman, Peter and Davis, Glyn. 2000. *The Australian Policy Handbook*. Australia: Allen & Unwin.
- Dunn, William N. 1981. *Public Policy Analysis : An Introduction*. USA : Prentice-Hal, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 07632.
- , 1992. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Terjemahan Muhajir Darwis. Yogyakarta : Penerbit PT. Hanindita.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. USA : Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, NJ.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hewlett, Michael & M. Ramesh. 2003. *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford Penerbit : University Press
- Jackson, Robert J, Jackson, Doreen and Moore, Nicholas Baxter, 1986, *Politics in Canada: Culture, Institutions, Behaviour and Public Policy*, Scarborough, Ontario: Prentice-Hall Canada Inc.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Mustopadidjaja. 2000. *Manajemen Proses Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- , 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Putra, Fadillah. 2005. *Kebijakan Tidak Untuk Publik*. Yogyakarta : Penerbit Resist Book.
- Patton, Carl V. & David S. Wawicki. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. USA : Prentice-Hal, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 07632.
- Quade, E.S. 1984. *Analysis for Public Decisions*. New York: The Rand Corporation
- Repley, Randall B. 1985. *Policy Analysis In Polical Science*. Cicago : Nelson- Hall Inc.
- Rushefsky, Mark, 1990, *Public Policy in the Unites States*, Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Weimer, David L. And Vining, Aidan R. 1998. *Policy Analysis Concepts and Practice*. New Jersey: Prentice Hall.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.
- Widodo, Jokowi. 2014. *Nawa Cita: Jalan Perubahan untuk Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian*. http://jkw4p.com/nawa_cita.pdf, diunduh 16 November 2014.
- Subianto, Prabowo. 2014. *Visi Misi dan Agenda Aksi*. http://kpu.go.id/koleksigambar/visi_misi_prabowo.pdf, dan <http://selamatkanindonesia.com/Agenda-Prabowo-Hatta.pdf>, diunduh pada 16 November 2014.